

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) (Amri Amir : 2004 : 2)

Pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban

psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (**Samuelson** : 2008 : 363-364).

Berkurangnya peran sektor barang yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan manufaktur jelas memperburuk kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Dari tahun ke tahun pengangguran di Indonesia terus berada pada kisaran angka 10 persen, padahal pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mencetak lapangan kerja tumbuh secara memuaskan (**Faisal Basri** : 2009 : 59).

Negara Indonesia sering dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Pengangguran Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 sebesar 5,7 persen. Tingkat pengangguran sebesar 5,7 persen masih merupakan pengangguran alamiah. Tingkat Pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Tingkat pengangguran ini sekitar 5-6 persen atau kurang. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5 persen itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*).

Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi seperti terlihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Indonesia 1990-2009
 (Sakernas : Berbagai edisi)

Melihat fenomena pengangguran yang terjadi di negara kita, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengangguran khusus di Propinsi Jawa Barat. Pengangguran di Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah penyumbang pengangguran tertinggi secara nasional, menjadi keprihatinan kita bersama. Mengingat peran Jawa Barat dalam perekonomian nasional cukup signifikan. Pada tahun 2007, Jawa Barat menjadi kontributor kedua terbesar (15,46%) setelah DKI Jakarta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Maka kestabilan perekonomian Jawa Barat menjadi sangat penting dalam menciptakan kestabilan perekonomian nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus mengalami peningkatan, meskipun terkesan lambat, yaitu pada kisaran 6,10-6,23% (dari tahun ke tahun). Namun, angka pertumbuhan ini hampir mendekati laju pertumbuhan ekonomi nasional 2007 sebesar 6,3%. Tapi angka pertumbuhan di Jawa Barat masih belum berkualitas. Mengingat belum mampu meningkatkan lapangan kerja maupun mengentaskan kemiskinan warganya. Standar kesehatan juga masih rendah terbukti dari mudahnya wabah penyakit menyerang.

Masalah pengangguran di Jawa Barat cukup serius. Bahkan, jumlah pengangguran di Jawa Barat berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua provinsi terdekatnya yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Acuan dasar permasalahan pengangguran mencuat adalah adanya ketimpangan dalam kerja atau kebutuhan tenaga kerja yang ada (*demand*) dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia (*supply*). Ketenagakerjaan menjadi layak diperbincangkan karena berkaitan erat dengan berbagai masalah sosial ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berbagai masalah ketenagakerjaan yang timbul sebagai salah satu dampak dari krisis ekonomi semenjak pertengahan tahun 1997.

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat dinilai sangat memprihatinkan karena berada di atas rata-rata nasional. Angka pengangguran terbuka Jabar turun dari 14,7 persen pada 2005 menjadi 11,9 persen pada 2009. Namun, itu tetap saja lebih tinggi daripada angka nasional 8,1 persen. Peneliti ekonomi dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jabar **Acuviarta Kartabi** mengatakan, kondisi itu menjadi indikasi ketidakmampuan industri menyerap tenaga kerja secara optimal. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah peningkatan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja (**Kompas** Rabu, 20 April 2010).

Tabel 1.1 merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat dan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran baik di Jawa Barat dan di Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2009 cenderung mengalami fluktuatif. Ini disebabkan oleh lapangan kerja yang lebih sedikit dibanding dengan angkatan kerja yang ada. Dapat dilihat dari data, tingkat pengangguran Indonesia yang paling tinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar 11,9%. Tingkat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 1%. Sedangkan dari tahun 2006 sampai tahun 2008 terus mengalami penurunan. Tingkat persentase yang paling rendah yaitu pada tahun 2009 sebesar 8,1%. Dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,36%. Sedangkan jika kita bandingkan, tingkat Pengangguran Jawa Barat, selalu berada di atas tingkat pengangguran nasional. Fluktuatifnya hampir sama yaitu tingkat pengangguran terendah pada tahun 2009, hanya saja di Jawa Barat Tingkat Pengangguran paling tinggi terjadi pada tahun 2005 hanya selisih 0.1 % dengan tahun 2006.

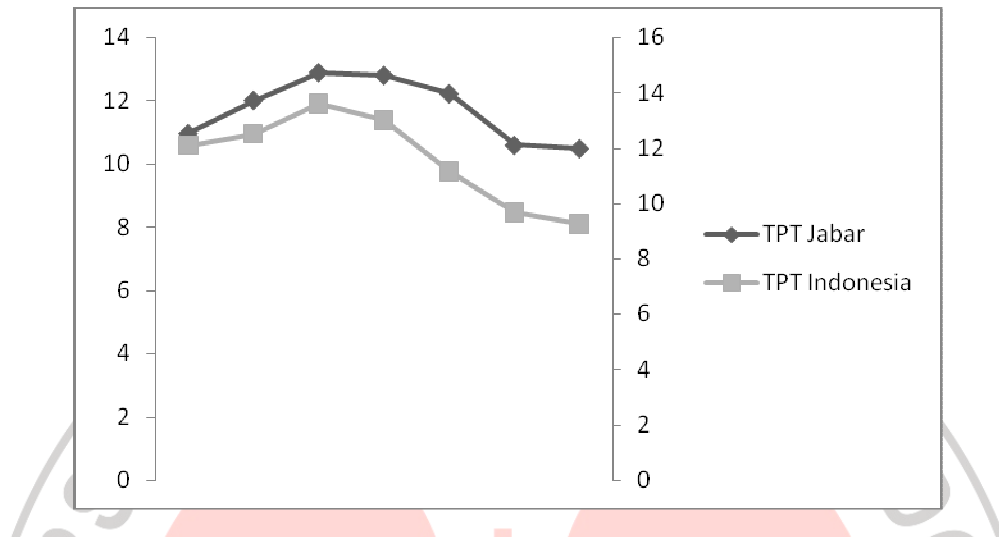
Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran terbuka Jawa Barat dan Indonesia

No	Tahun	Tingkat Pengangguran terbuka Jawa Barat (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%)
1	2003	12,5	10,58
2	2004	13,7	10,94
3	2005	14,7	11,90
4	2006	14,6	11,38
5	2007	13,94	9,75
6	2008	12,08	8,46
7	2009	11,96	8,10

Sumber : BPS (Sakernas berbagai edisi)

Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran Jawa Barat sangat memprihatinkan karena selalu berada di atas tingkat pengangguran nasional. Agar

lebih jelas bahwa Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat selalu lebih tinggi, dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1
TPT Jawa Barat dan TPT Indonesia
Periode 2003-2009
(Sakernas : Berbagai edisi)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2008 tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 9,43 juta orang atau sekitar 8,46% dari total populasi. Tahun 2009, menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah pengangguran terbuka kembali turun menjadi sekitar 8,96 juta jiwa. Meski mengalami penurunan, hal itu tetap harus diwaspadai karena mayoritas penduduk yang menganggur merupakan pengangguran terdidik lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Jika di lihat data pengangguran menurut provinsi, data BPS menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki angka pengangguran terbuka paling besar, yaitu menurut kategori mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja yang berjumlah 2.262.407 orang (**Sakernas Februari 2008**).

Angka ini menunjukkan 23,99% pengangguran Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Untuk tahun 2009 angka pengangguran terbuka Jawa Barat 2.262.889 berarti 37,84% dari jumlah pengangguran Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa dua tahun terakhir, angka pengangguran Jawa Barat memiliki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bahwa Jawa Barat memberi kontribusi yang cukup tinggi dalam perekonomian Nasional, jika keadaan Regional Jawa Barat sendiri tidak seimbang, dalam artian walaupun laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tanpa diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan, sehingga menimbulkan *gap* yang tinggi, maka akan berdampak pada perekonomian nasional. Untuk lebih jelasnya, data pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Pada Tahun 2008 jumlah pengangguran sebesar 2.262.407 orang menurun sebesar 123.807 orang dibandingkan Tahun 2007, sedangkan presentase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 12,08 % menurun dari Tahun 2007. Dan terakhir, pada tahun 2009 angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,3% dari tahun sebelumnya. Penurunan angka pengangguran selama tiga tahun berturut-turut menandakan adanya perbaikan di dalam penyerapan tenaga kerja, hanya saja jika dibandingkan dengan provinsi lain angka pengangguran Jawa Barat merupakan angka paling tinggi, begitupun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional, tingkat pengangguran Jawa Barat selalu lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, angka

pengangguran Indonesia menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pengangguran Indonesia berdasarkan provinsi (tahun 2009)

No	Provinsi	Jumlah Pengangguran Terbuka	% Terhadap Pengangguran Indonesia
1	Nangro Aceh Darussalam (NAD)	95.160	0,02
2	Sumatra utara	249.396	4,17
3	Sumatra barat	97.690	1,63
4	Riau	137.142	2,29
5	Jambi	48.576	0,81
6	Sumatra selatan	168.428	2,82
7	Bengkulu	29.206	0,49
8	Lampung	122.408	2,05
9	Kep.Bangka Belitung	17.193	0,29
10	Kep.Riau	30.464	0,51
11	DKI Jakarta	320.549	5,36
12	Jawa Barat	2.262.889	37,84
13	Jawa Tengah	755.282	12,63
14	D.I. Yogyakarta	76.798	1,28
15	Jawa Timur	731.111	12,22
16	Banten	393.120	0,66
17	Bali	41.600	0,70
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	91.106	1,52
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	34.024	0,57
20	Kalimantan Barat	83.167	1,39
21	Kalimantan Tengah	30.983	0,52
22	Kalimantan Selatan	59.075	0,99
23	Kalimantan Timur	114.000	1,91
24	Sulawesi Utara	44.333	0,74
25	Sulawesi Tengah	37.830	0,63
26	Sulawesi Selatan	150.184	2,51
27	Sulawesi Tenggara	20.255	0,34
28	Gorontalo	10.398	0,17
29	Sulawesi barat	14.717	0,25
30	Maluku	30.861	0,52
31	Maluku Utara	13.172	0,22
32	Irian jaya Barat	18.984	0,32
33	Papua	23.484	0,39

(Sumber : BPS, Sakernas 2009)

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, melemahnya permintaan domestik dan berbagai kendala yang timbul dalam proses produksi sebagai dampak krisis moneter yang berkepanjangan telah memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kondisi kesempatan kerja di Indonesia terlebih terhadap propinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan sebagian perusahaan mengurangi bahkan menghentikan produksi. Perkembangan ini selanjutnya mendorong berkurangnya permintaan terhadap tenaga kerja seperti tercermin dari peningkatan PHK atau pemberhentian tenaga kerja.

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya bekerja di sektor modern atau di kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia untuk menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau di daerah yang kegiatan industri telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Sebaliknya, angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonomi masih tertumpu pada sektor tradisional, terlebih jika tingkat pendidikan di daerah itu masih rendah (Kuncoro, Mudradjat : 2006 : 230-231).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya: *Pertama*, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara *supply* and *demand*). *Kedua*, kesenjangan antara kompetensi

pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (*mis-match*), *Ketiga*, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai (*unskill labour*), dan *Keempat*, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global. Dari keempat faktor tersebut, faktor pertama, kedua dan ketiga merupakan faktor dominan yang menyebabkan pengangguran di Indonesia. Dari gambaran tersebut di atas maka perlu dikembangkan program-program kursus dan pelatihan dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran (**Disnakertrans Jabar : 2009 : 9**).

Bila dicermati secara lebih mendalam, berbagai soal ketenagakerjaan yang ada menurut **Hadi Sutjipto (2007 : 47)**, antara lain disebabkan oleh,

pertama pemerintah mengabaikan penciptaan lapangan pekerja, pendidikan rakyat dengan keterampilan, dan penyediaan jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan. Secara ekstrim negara menjual pendidikan dan kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dengan era otonomi daerah, dunia pendidikan dan kesehatan mengalami imbas kian negative. Faktor *ke dua* menurut Hadi adalah adanya eksploitasi buruh oleh penguasa kapitalisme melalui pemberian gaji murah. Dalam masyarakat kapitalistik, tugas negara lebih pada regulasi, yakni pengatur kebebasan warga negaranya dan bukan sebagai negara pengurus dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pada kondisi seperti ini, hanya penduduk yang bekerja keraslah yang mampu memenuhi baik kebutuhan dasar, atau kebutuhan pelengkap, sehingga prinsip *Struggle for life* benar-benar terjadi.

Jika terkena bencana atau kebutuhan hidupnya meningkat, ia harus bekerja secara lebih mutlak. Begitu pula jika ia sudah tidak mampu bekerja karena usia, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, atau sebab lainnya, ia tidak lagi mempunyai pintu pemasukan dana. Kondisi ini menyebabkan kesulitan hidup luar biasa, terutama bagi warga yang sudah tidak mampu bekerja atau bekerja dengan

gaji yang sangat minim sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan pengangguran menjadi kompleks, karena cabangnya terus menjulur ke berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Menyikapi kondisi tersebut, maka masalah pengangguran dan kemiskinan menjadi fokus sasaran program-program Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Salah satu program unggulan dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan kemiskinan di atas melalui kursus dan pelatihan adalah program kursus.

Selain itu dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang telah ditetapkan dalam agenda pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2003-2008, yaitu **“Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”** guna mendukung pencapaian visi Jawa Barat 2010, dalam kerangka pelaksanaan agenda dimaksud, ditetapkan 5 misi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas Jawa Barat
2. Pengembangan Struktur Perekonomian Regional yang tangguh
3. Pemantapan kinerja pemerintahan daerah
4. Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan
5. Peningkatan kualitas kehidupan sosial berlandaskan agama dan budaya daerah.

Dalam pelaksanaannya kebijakan yang berhubungan dengan pengangguran, yaitu misi yang ke-2, yaitu pengembangan struktur perekonomian Regional yang tangguh, salah satu programnya yaitu, peningkatan penanaman modal di daerah untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja. Pemerintah

Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah pengangguran ini, dalam ranah pendidikan, pemerintah sudah mengupayakan agar mata pelajaran kewirausahaan masuk ke tingkat sekolah menengah, terlebih untuk tingkat perguruan tinggi pemerintah menjadikan mata kuliah wajib, dengan harapan output dari pendidikan, nantinya dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Kemudian dalam pengembangan UKM, banyak dana yang digulirkan baik itu dari pihak pemerintah, atau dana sosial perusahaan di Jawa Barat, sedangkan untuk peningkatan *skill* masyarakat, pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Namun hal tersebut masih belum bisa dipandang sukses, karena jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat ternyata masih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Perubahan tingkat pengangguran dari sisi ekonomi baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencerminkan stabil tidaknya kondisi ekonomi penduduk di suatu wilayah. Besarnya angka pengangguran terbuka, mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja berarti tidak mempunyai penghasilan. Hilangnya sumber penghasilan membuka peluang penduduk untuk mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, yang pada akhirnya mampu membawa mereka ke dalam jurang kemiskinan. Persoalannya semakin rumit, karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang mungkin ditimbulkannya, contohnya timbul segala bentuk kriminalitas.

Kerugian yang disebabkan pengangguran diukur dalam bentuk keluaran yang hilang bagi keseluruhan ekonomi dan kerugian yang disebabkan oleh mereka

yang menganggur. Konsekuensi yang ditimbulkan yaitu : *pertama* orang yang menganggur adalah orang yang mampu bekerja, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan. Pengangguran merupakan sumber daya yang berharga yang potensi keluarannya tersia-sia, jika keluarannya tidak ada maka potensi PDB akan tidak jadi untuk dihasilkan. *Kedua* Biaya pribadi banyak kebijakan-kebijakan sosial untuk meringankan akibat ekonomis jangka pendek dari pengangguran, contoh nyata di Indonesia adalah pemberian BLT. Tetapi efek jangka panjang angka pengangguran yang tinggi, dalam bentuk perasaan kecewa para pekerja yang menganggur dan dapat menyebabkan keresahan (**Lipsey** : 1997 : 39).

Uraian yang menyangkut rasa khawatir atau tingkat pengangguran yang tinggi telah dikemukakan pakar ekonomi :

Princeton Alan Blinder menyatakan perekonomian bertekanan tinggi menyediakan peluang memungkinkan perubahan struktural, mendorong penemuan baru dan inovasi, membuka pintu bagi masyarakat bawah. Semua ini mendorong kohesi sosial dan kemajuan ekonomi yang menjadikan kapitalisme demokratis sistem yang hebat bila memang bekerja dengan baik. Perekonomian bertekanan menutup pintu, melahirkan mentalitas penakut yang menolak perubahan, menghambat pertumbuhan produktivitas, dan memupuk kebijakan umum yang tidak adil. Semua ini membuat penciptaan angka pengangguran yang tinggi sebagai tantangan politik, ekonomi, dan moral yang paling tinggi prioritasnya. (**Lipsey** : 1997 : 40)

Jika melihat sudut pandang ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dapat dilihat dari investasi. Realisasi investasi dapat mempengaruhi angka pengangguran, semakin tinggi angka investasi yang dapat direalisasikan, terlebih jika investasi pada sektor padat karya (industri) akan mempercepat penyerapan tenaga kerja. Selain itu jika ada suatu industri yang hampir bangkrut,

tapi dapat ditolong dengan penambahan modal melalui investasi, maka tidak akan terjadi PHK, sehingga jumlah pengangguran dapat lebih ditekan.

Menurut **Faisal Basri** dalam **Lanskap Ekonomi Indonesia** (2009 : 7) :

Investasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran, kalau investasi turun, maka kegiatan – kegiatan produksi secara nasional akan ikut turun (sejauh mana dampaknya tentu bergantung pada sektornya). Jika kegiatan produksi turun, dengan sendirinya output pun merosot, dan kalau output terus menerus turun, maka pada gilirannya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga akan merosot, baik dalam angka persentase atau dalam kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah yang mampu menyerap tenaga kerja. Dalam analisisnya, investasi yang terjadi di Indonesia terjadi penurunan pada sector riil. Padahal investasi riil merupakan investasi yang secara langsung dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan seimbang antara persentase dan kualitasnya.

Tapi pada kenyataannya sekarang investasi banyak bergerak di sektor jasa dan sektor padat modal, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya meningkat pada persentasenya saja tanpa diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan hanya dimiliki oleh pemilik modal. Jika situasi timpang seperti ini terus berlanjut, maka output lambat laun tertekan, dan dalam waktu bersamaan masalah pengangguran (dan rendahnya produksi sektor riil) tetap sulit diatasi. Disisi lain penggalakkan perdagangan obligasi resmi sebagai instrument pembiayaan fiskal pemerintah membuat investasi finansial sangat penting dan karenanya dibuat menarik di Indonesia. Pelaku investasi ini bukan hanya perorangan, melainkan juga pemerintah daerah provinsi atau kabupaten yang sejak era otonomi daerah mengelola sendiri dana dalam jumlah yang lebih banyak dari pada sebelumnya. Alokasi yang terus bertambah dari pemerintah pusat ternyata tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, sehingga menumpuk di sektor perbankan, terutama berupa Sertifikat Bank Indonesia.

Faktor ekonomi lain yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh **Hukum Okun**, dimana Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggerakkan asosiasi jangka pendek pada GDP nyata dan perubahan angka pengangguran.

Berpijak pada latar belakang diatas tentunya masalah pengangguran sangat menarik untuk diteliti lebih jauh, dalam hal ini penulis membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka diantaranya : laju pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selengkapnya judul penelitian yang akan penulis angkat adalah **“Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Pengangguran Terbuka Jawa Barat Periode 1980-2009”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran investasi di Jawa Barat tahun1980-2009?
2. Bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun1980-2009?
3. Bagaimana gambaran pengangguran Jawa Barat Tahun 1980-2009?
4. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Periode 1980-2009?
5. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat Periode 1980-2009?

6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat Periode 1980-2009?
7. Bagaimana pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat Periode 1980-2009?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran investasi di Jawa Barat tahun 1980-2009.
2. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 1980-2009.
3. Untuk mengetahui gambaran pengangguran Jawa Barat Tahun 1980-2009.
4. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Periode 1980-2009.
5. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat Periode 1980-2009.
6. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat Periode 1980-2009.
7. Untuk mengetahui pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Barat Periode 1980-2009.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.2.1 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi informasi bagi pihak-pihaknya dalam kaitan faktor-faktor yang menjadi pemicu meningkatnya pengangguran, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan upaya menekan laju pertumbuhan pengangguran terbuka di Jawa Barat serta pengembangan dan perencanaan program peningkatan kualitas angkatan kerja.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

Mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengangguran terbuka di Jawa Barat.